MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

Nomor: 532/DJMT.1/SP.KP7.4/VI/2026

Dasar :

1. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
2. Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 691/BSDK/DL1.6/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Klasikal Tahun 2026;
3. Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 491/DJMT.1/ ST.KP7.1/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026 perihal Melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Klasikal Tahun 2026 secara offline bertempat di Kampus Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor-Jawa Barat 16770.

MENUNJUK:

Kepada :

Nama	:	Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M.
NIP	:	198003222002122004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Mutasi Sekretariat

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan 1 Juli 2026 disamping melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Sekretariat, juga sebagai Pelaksana Harian Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Tembusan:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.